



TRANSFORMASI

Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam

VOLUME 1 NOMOR 2 JUNI 2018

CURRICULUM 2013 IN RELATION TO EDUCATION FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDONESIA: WHY,
WHAT, AND HOW

Rusli

TINJAUAN KRITIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN
KARAKTER SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN
POLITIK BAGI KADER PARPOL

Hasan Hanafi

PEMIKIRAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN IKHWANUL
MUSLIMIN PASCA MUSIM SEMI ARAB

Syawaluddin

OPTIMALISASI MANAJEMEN KEUANGAN
PENDIDIKAN DI INDONESIA

Hikmah

PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS BERDASARKAN
PENDEKATAN SAINTIFIK KURIKULUM 2013 DI
KELAS VII MTs DDI JOLLE

Kasmah & Syamsir Bin Rukka

PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF POLITIK

Restu Rahmawati



**PASCASARJANA IAIN SORONG
PAPUA BARAT**

PEMIKIRAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN IKHWANUL MUSLIMIN PASCA MUSIM SEMI ARAB

Syawaluddin

Dosen Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Watampone

syawal.bone2015@gmail.com

Abstract

This paper seeks to uncover the political thought and governmental concept of the Egyptian president, Muhammad Mursy, who was democratically elected for the first time, after the “Arab Spring”. Mursi is a members of the Muslim Brotherhood (IM) who was regarded as a forbidden party or an illegal mass organi- zation in Egypt before. This research based on literature research that seeks to collect the data related to the political thought and governmental concept of Muhammad Mursi as a members of the Muslim Brotherhood party, whether from the Internet or books that discuss about the phenomenon. This research found a num- ber of discoveries conducted by Mursi such as; the opening of a border gate in Gaza for Palestinians to enter Egypt, The vice-president’s from women and non-Muslims, restrict military gains in politics, and the others controversial decision.

Keywords : *Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi, Political, Islamic Political Party, Military Movement, Egypt*

Abstrak

Penelitian ini berusaha untuk mengungkap pemikiran politik dan konsep pemerintahan dari presiden Mesir, Muhammad Mursy, yang terpilih secara demokrasi untuk pertama kalinya, pasca peristiwa “Musim Semi Arab” yang berlangsung di beberapa negara Timur Tengah. Mursi merupakan salah satu kader dari Ikhwanul Muslimin yang sebelumnya dianggap sebagai partai atau ormas terlarang di Mesir. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang berusaha untuk mendokumentasikan atau mengumpulkan data-data yang terkait dengan pemikiran politik dan konsep pemerintahan dari Muhammad Mursi sebagai salah satu kader dari partai Ikhwanul Muslimin, baik yang berasal dari Internet maupun buku yang mengkaji tentang fenomena tersebut. Penelitian ini mengungkap sejumlah penemuan dan terobosan yang dilakukan oleh Mursi seperti; pembukaan pintu perbatasan di Gaza bagi warga Palestina yang ingin memasuki Mesir, Penunjukan Wakil Presiden untuk pertama kalinya berasal dari kaum Perempuan dan Non-Islam, Keberanian untuk membatasi gerak militer dalam bidang politik, dan keputusan untuk mengeluarkan dekrit yang dianggap sangat kontro- versial di Mesir.

Kata Kunci : *Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi, Politik, Partai Politik Islam, Gerakan Militer, Mesir*

PENDAHULUAN

Mei-Juni 2011, menjadi babak baru bagi sejarah perkembangan dan dinamika perpolitikan di Mesir. KPU Mesir menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis, pertama kalinya sejak Negara itu dipimpin oleh rezim Husni Mubarak pada tahun 1981. Sebelumnya, ketika Mubarak memegang kendali pemerintahan, masyarakat Mesir pernah mengikuti beberapa kali pemilu untuk memilih Presiden dan anggota parlemen. Namun, peserta pemilu dibatasi dan Mubarak selalu muncul sebagai calon tunggal, sehingga pemilu tersebut terkesan formalistic belaka.¹ Misalnya, dalam surat suara hanya ada dua pilihan “apakah anda masih setuju Mubarak jadi Presiden atau tidak”. Pemandangan itu mirip dengan suasana perpolitikan Indonesia, ketika Soeharto memegang kendali pemerintahan. Manipulasi dan penggelembungan suara kerap terjadi dan jatah kursi partai opisisi di parlemen dan pemerintahan dibatasi.

Sebenarnya, Mesir menganut sistem semipresidensial multipartai. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dipegang dan dibagi antara Presiden dan Perdana Menteri. Namun dalam prakteknya, kekuasaan tersebut terpusat pada presiden. Bukan hanya eksekutif, kekuasaan legislatif dan yudikatif juga di bawah kendali presiden. Akhir Februari 2005, Mubarak mulai melunak dalam politiknya dengan mengumumkan perubahan baru aturan dalam pemilihan presiden yang multi kandidat.² Jika system sebelumnya multi partai dan hanya terdiri dari calon tunggal, pemilu kali ini diikuti oleh beberapa kandidat. Namun, perubahan aturan tersebut juga sekedar formalistic belaka. Beberapa tokoh yang dianggap lawan politik dan pesaing berat Mubarak, dicekal pencalonannya. Mubarak pun terpilih kembali menjadi Presiden untuk kelima kalinya.

Selama 30 tahun memegang kursi kepresidenan, Mubarak menerapkan system yang sangat otoriter di Mesir. Jabatan wakil presiden dihilangkan (pada masa akhir jabatannya diadakan kembali), sistem kepartaian diatur dan dibatasi, militer terlibat langsung dalam politik dan memegang peranan yang cukup besar, pihak opisisi dan lawan politiknya hamper tidak memperoleh kesempatan untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka, di depan public.³

¹ <http://historia.co.id/?d=722>, diakses 12 Desember 2012.

² <http://suar.okezone.com/read/2011/09/21/285/505135/> membaca-revolusi-mesir, diakses 12 Desember 2012

³ http://www.jurnas.com/halaman/6/2012-07-02/214265_, diakses 12 Desember 2012.

Pemandangan itu berubah total, pada 11 Februari 2011, ketika Mubarak harus lengser secara paksa dari tampuk kepemimpinannya. Jutaan masyarakat Mesir yang dipelopori oleh pemuda dan mahasiswa berhasil menggulingkan rezim yang dikenal sangat dictator tersebut. Dunia perpolitikan di Mesir pun memasuki babak yang baru. Bermula pada bulan Mei 2012, Mesir menyelenggarakan Pemilu untuk menentukan Presiden baru, pasca Mubarak. Pemilu kali ini diikuti oleh 13 kontestan, lalu beberapa dari mereka gugur dan tersisa dua kontestan yang cukup berpengaruh di kalangan masyarakat, yaitu: Ahmed Shafiq dan Muhammad Mursi. Ahmed Shafik adalah mantan Perdana Menteri terakhir di era Mubarak. Beliau dikenal sangat loyal kepada mantan presiden Mubarak. Oleh karena itu, Shafiq didukung penuh oleh pihak militer Mesir (SCAF) dan kroni-kroni Mubarak. Sedangkan, Muhammad Mursi adalah calon dari Partai Kebebasan dan Keadilan Mesir (FJP). FJP adalah sayap politik Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir.⁴

Sebelumnya, pada pemilu legislatif, 28 November 2011, hasilnya memihak kepada PJF, serta beberapa partai Islam lainnya. FJP menang telak dengan perolehan suara sebanyak 47,18 % dan menguasai 235 kursi dari 498 kursi yang tersedia di Dewan Perwakilan Rakyat. Posisi kedua ditempati oleh partai Islam lainnya, Partai Salafian-Nur sebanyak 25% suara dan berhak atas 121 kursi di parlemen. Sementara itu, partai yang beraliran liberal, seperti Partai Wafd (pengusung Shafik) meraih 36 kursi. Partai sekuler dan Partai Koalisi Mesir memperoleh 33 kursi.⁵ Pemilu tersebut, menjadikan partai-partai Islam menguasai kursi sekitar dua per tiga di parlemen. Pada pil-pres Mei-Juni 2012, menempatkan Mursi sebagai pemenang dengan 51,7 persen dan berhak menggantikan posisi Mubarak yang telah berkuasa selama kurang lebih 30 tahun.⁶

Februari 2012, Mursi resmi menduduki kursi kepresidenan Mesir, setelah dilantik oleh Mahkamah Konstitusi. Itu pulalah yang menjadi awal pemikiran politik Mursi dan IM. Tentu banyak terobosan-terobosan dan kebijakan-kebijakan baru yang dilakukan oleh Mursi selama beberapa bulan

⁴<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/etak/2012/05/27/187593/Mursi-Shafiq-ke-PutaranKedua>, diakses tanggal 12 Desember 2012.

⁵http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/01/120121_mesir_pemilu.shtml, diakses tanggal 12 Desember 2012.

⁶<http://internasional.kompas.com/read/2012/06/24/2202526/Mursi.Menangi.Pilpres.Mesir,des>

menjadi Presiden. Makalah ini akan menganalisa perkembangan pemikiran politik Mursi, selama menjadi orang nomor satu di tanah Fir'aun tersebut.

PEMBAHASAN

A. Siapakah Muhammad Mursi Itu?

Muhammad Muhammad Mursi Al-Ayyat adalah nama lengkap dari Presiden Mesir yang kelima. Beliau dilahirkan Al-Sharqia, 20 Agustus 1951. Gelar Sarjana Muda dan Magister diperoleh di Universitas Kairo, bidang teknik pada tahun 1975 dan 1978. Kemudian, beliau melanjutkan studi di Amerika dan mendapatkan gelar PhD bidang teknik dari *University of Southern California*, Amerika Serikat pada 1982. Pada tahun itu juga, Mursi menjadi asisten profesor di *California State University, Northridge*, hingga tahun 1985. Beliau lalu kembali ke Mesir untuk mengajar di Universitas Zagazig, pada tahun 1985.⁷

Keterlibatan Mursi di dunia politik dimulai sejak tahun 2000. Beliau diangkat menjadi anggota parlemen Mesir pada periode 2000-2005, mewakili provinsi Zagazig. Mursi memilih jalur independen (non partai), karena secara teknis presiden Husni Mubarak melarang anggota dan simpatisan IM mencalonkan diri melalui jalur partai IM. Mursi juga pernah menjabat sebagai menjadi anggota Kantor Bimbingan Ikhwanul Muslimin. Puncak karir politiknya dalam partai adalah ketika mendirikan Partai Kebebasan dan Keadilan (PJF) dan menjadi ketuanya pada tanggal 30 April 2011.⁸ PJF merupakan partai sayap dari Ikhwanul Muslimin, yang tidak bisa ikut pemilu karena dianggap partai terlarang oleh pemerintah Mesir.B.

B. Pro Perjuangan Rakyat Palestina

Meski tidak ikut perang langsung bersama rakyat Palestina melawan Israel, tapi Mursi menunjukkan keberpihakannya terhadap perjuangan rakyat Palestina. Jalur Gaza sebagai wilayah yang berbatasan dengan Mesir, yang telah diblokade oleh Mubarak pada tahun 2007, resmi dibuka kembali oleh Mursi

⁷ http://de.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Mursi, diakses 12 Desember 2012.

⁸ <http://al-ikhwan.net/tokoh-ikhwan/profil-presiden-me-sir-prof-dr-uhammad-mursi>, akses 12 Desember 2012.

pada tahun 2012. Orang-orang Palestina yang tinggal di wilayah tersebut dibebaskan untuk berkeliaran keluar-masuk Mesir-Palestina. Jalur Gaza diblokade pada era Mubarak karena wilayah tersebut dikuasai oleh pejuang Hamas. Mubarak takut jika pejuang-pejuang Hamas mempergunakan wilayah tersebut untuk memasok senjata dan perlengkapan perang lainnya dari luar, termasuk dari Mesir. Sebelumnya, pada masa Presiden Anwar Sadat, Mesir dan Israel terikat dengan perjanjian “Camp David”⁹ yang menjadikan Mesir sebagai pihak opisi dan tidak boleh memihak, terkait dengan sengketa antara Israel dan Palestina.

Jadi, blockade Gaza ditempuh oleh Mubarak untuk meredam isu internasional yang mengatakan bahwa Jalur Gaza digunakan oleh pihak Hamas untuk menyeludupkan senjata dan peralatan perang dari luar Palestina. Tuduhan pro terhadap perjuangan Palestina juga menjadi alasan blokade Jalur tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Jalur Gaza merupakan salah satu wilayah darat yang digunakan oleh orang-orang Palestina yang hendak keluar dari Negara tersebut. Jalur ini pula yang menjadi jalur alternatif yang dilalui oleh masyarakat internasional ketika hendak masuk ke wilayah Palestina, via Mesir. Jadi, posisi wilayah ini sangat strategis dan penting untuk mengakses segala bantuan untuk masyarakat Palestina, yang datang dari luar. Sayangnya, hanya sesekali saja pintu perbatasan di Jalur Gaza dibuka oleh pemerintah Mesir.

Sejak resmi memegang kursi kepresidenan, Mursi mencabut keputusan kontroversial yang dibuat oleh Mubarak, dengan membuka blokade di Jalur Gaza dan memberikan kesempatan kepada segenap masyarakat Palestina untuk keluar masuk Mesir-Palestina via Gaza. Mursi juga membebaskan masyarakat Palestina untuk keluar-masuk Mesir, meski tidak memiliki visa.¹⁰

Sebelumnya, orang-orang Palestina yang hendak ke Mesir, terlebih dahulu harus mendapatkan visa dan izin di gerbang perbatasan Gaza-Mesir untuk memasuki wilayah Mesir dan sekitarnya. Keputusan Mursi menjadi angin segar bagi masyarakat Palestina, yang selama ini dikekang oleh pihak Israel.

Sejumlah pengamat politik berpandangan bahwa Mursi telah mengabaikan dan seolah hendak menghapus keputusan-keputusan perjanjian “Camp Davids” antara Mesir dan Israel, yang selama ini dinilai telah merugikan

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Camp_David, diakses 12 Desember 2012.

¹⁰ <http://arrahmah.com/read/2012/07/25/21864-mesir-izinkan-warga-palestina-ebas-menyeberangi-perbatasan-ra-fah-tanpa-visa.html>, diakses 10 Desember 2012.

Negara-negara Arab, khususnya Palestina. Padahal sebelumnya, Mursi telah mengumumkan pandangan politiknya bahwa segala perjanjian internasional yang melibatkan Mesir dan Negara-negara yang lain, masih tetap berlaku pada saat dirinya menjabat Presiden.

Bukti lain dari keberpihakan Mursi terhadap perjuangan rakyat Palestina adalah pengusiran Duta Besar dan para diplomat Israel dari Kairo.¹¹ Bukan Cuma itu, Mursi juga menarik dan memanggil kembali Duta Besar Mesir yang berada di Tel Aviv. Sebagaimana diketahui bahwa Mesir adalah salah satu Negara Arab yang menjalin kerja sama yang baik dengan Israel. Mesir adalah salah satu Negara Arab yang memiliki kantor kedutaan besar di Israel. Israel juga memiliki gedung kedutaan di Kairo. Namun, dengan adanya kebijakan penarikan Duta Besar tersebut, sejumlah pertanyaan mengemuka di publik. Akankah Mursi mengakhiri hubungan diplomatik dengan Israel ataukah penarikan itu terkait dengan kebijakan politis sementara. Hingga saat ini penulis belum bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci.

C. Wacana Wakil Presiden Perempuan Dan Negara Islam

Salah satu keputusan Mursi yang juga dianggap kontroversial adalah wacana penunjukan wakil presiden dari kalangan perempuan. Keputusan tersebut menjadi lebih kontroversial karena perempuan tersebut merupakan non-Islam (Kristen Koptik). Selama ini, kelompok IM dikenal vocal dan kurang sepakat dengan keterlibatan perempuan, apalagi non-Islam, di pemerintahan dan diparlemen. Mursi yang dianggap sebagai representasi IM seolah ingin membantah adagium tersebut, dengan melakukan terobosan baru, yaitu penunjukan perempuan non-Islam jadi wakil presiden di Mesir.¹² Bagi Mursi, tidak ada perbedaan politik antara perempuan dan laki-laki, kecuali perbedaan yang berdasarkan konstitusi dan hukum. Namun, penunjukan tersebut urung dilakukan oleh Mursi dan lebih memilih Mahmoud Mekky, kader IM, sebagai wakil presidennya.

Di samping itu, Mursi juga menegaskan bahwa dirinya tidak berniat mendirikan Negara Islam di Mesir. Beliau hanya ingin menjadikan Mesir sebagai Negara demokrasi yang dipimpin oleh sipil. Hal itu tentu bertentangan dengan sikap pendahulu-pendahulunya yang hendak mendirikan Negara Islam atau Negara yang berdasarkan asas Islam di

¹¹ <http://www.islamtimes.org/vdcjhve8yuqevxz.bnfu.html>, diakses 10 Desember 2012.

¹² <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/329969-presiden-me-> sir-cetak-sejarah-baru, diakses 12 Desember 2012

Mesir. Sejarah Mesir mencatat bahwa IM beberapa kali terlibat perselisihan bahkan peperangan dengan pihak pemerintah Mesir karena pandangan politiknya yang dianggap berseberangan dengan ide-ide demokrasi yang dicetuskan oleh pemerintah. Bahkan, beberapa tokoh IM ditangkap, dipenjara, dan dibunuh karena pandangannya yang radikal, yang ingin menjadikan Mesir sebagai Negara yang berdasarkan asas Islam atau Negara Islam.¹³

D. Berani Melawan Militer

Meski bukan berasal dari kalangan militer, tapi Mursi telah memperlihatkan keberaniannya untuk melawan militer, dengan mengeluarkan beberapa keputusan yang dianggap tidak pro terhadap pimpinan mereka. Sebagaimana diketahui bahwa menjelang pilpres putaran kedua, 16 Juni 2012, pemimpin tertinggi Dewan Militer, Jenderal Hussein Tantawi, mengumumkan konstitusi baru, sehingga militer memiliki kekuasaan membubarkan parlemen dan itu dilakukan, mengisi kekosongan di legislatif dan bisa saja mencopot Mursy dengan berbagai alasan. Selain itu, Dewan Militer juga punya kekuasaan membuat Undang Undang baru, mengurus keuangan nasional dan kebal terhadap hukum.¹⁴ Keputusan tersebut menempatkan militer di atas posisi Presiden, yang kelak terpilih.

Setelah beberapa bulan menjabat sebagai Presiden, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2012, Mursi lalu melakukan beberapa perubahan di tubuh para pejabat dan petinggi militer Mesir. Beliau memberhentikan ketua Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, yang juga merangkap sebagai menteri pertahanan, Hussein Tantawi dan Kepala Staf Angkatan Darat, Sami Anan.¹⁵ Keduanya merupakan pejabat yang dianggap masih loyal kepada Mubarak. Mursi lalu menunjuk Abdul Fatah al-Sisi sebagai Menteri Pertahanan yang baru dan beberapa pejabat yang dianggap netral dan bukan antek-antek mantan Presiden Mubarak. Keputusan itu dianggap sebagai tindakan politis untuk memecah belah kekuatan yang ada dalam militer yang selama ini dianggap masih simpati terhadap Mubarak.

¹³ Anas Al-Hajaji, *Otobiografi Hasan Albanna; Tokoh Pejuang Islam*, Penerjemah Bahrin Abu Bakar dan Anwar Rasydi, (Bandung: Risalah Bandung, 1983), hal. 55.

¹⁴ http://www.kendarinews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=30053&Itemid=9, diakses 12 Desember 2012.

¹⁵ <http://www.jurnas.com/halaman/13/2012-08-14/218833>, diakses 12 Desember 2012.

E. Kontroversi Dekrit Presiden Mursi

Tanggal 30 Nopember 2012, Mursi mengeluarkan dekrit yang controversial, yang menyebabkan gelombang demonstrasi besar-besaran di Mesir. Demonstrasi tersebut bahkan menelan beberapa korban jiwa dan luka-luka dari kedua belah pihak, pendukung dan penentang dekrit tersebut. Diantara point-point yang penting bagi penulis adalah:

1. Investigasi ulang dan adili seluruh pihak yang terlibat dalam pembunuhan para demonstran “Revolusi 25 Januari”.
2. Pergantian posisi Jaksa Agung.
3. Lembaga Yudikatif tidak berhak membubarkan MPR dan Dewan Perumus Konstitusi Mesir.
4. Presiden diperkenankan untuk mengambil langkah-langkah tegas jika disinyalir ada pihak yang melakukan tindakan yang dapat mengancam agenda revolusi, kehidupan warga, kesatuan negara, keselamatan negara, atau menghalangi lembaga negara dalam menjalankan fungsinya.¹⁶

Itulah beberapa point yang dikeluarkan oleh Mursi yang mengundang demonstrasi berdarah di Mesir. Demonstrasi itu, disinyalir oleh pihak Mursi, sengaja didesain oleh pihak-pihak oposisi dan kroni Mubarak yang tidak setuju dengan kepemimpinan Mursi dan IM. Dengan dekrit tersebut, mereka menuduh Mursi sudah jadi Firaun baru yang hendak berkuasa mutlak di Mesir. Point yang dianggap paling krusial adalah keterlibatan langsung Mursi dalam lembaga yudikatif dengan mengganti Jaksa Agung, Abdul Majid Mahmud. Abdul Majid Mahmud diberhentikan dari Jaksa Agung menjadi Dubes di Vatikan karena dianggap sebagai pejabat yang masih loyal kepada Mubarak. Abdul Majid Mahmud-lah yang telah membekukan semua aduan masyarakat atas kasus yang menimpah kroni-kroni Mubarak. Beliau juga yang menyembunyikan data-data pengadilan kasus tersebut. Sehingga, banyak pejabat rezim Mubarak yang dibebaskan karena bukti-bukti kejahatan mereka disembunyikan, bahkan dihilangkan oleh Jaksa Agung tersebut. Oleh karena itu, Mursi mengeluarkan keputusan politik dengan mencopot jabatan Abdul Majid Mahmud sebagai Jaksa Agung menjadi

¹⁶ <http://www.pkspiungan.org/2012/11/dekrit-mursi-aw-al-peperangan.html>, diakses 10 Desember 2012.

Dubes.¹⁷

Pihak oposisi dan kroni-kroni Mubarak tidak setuju dengan pencopotan tersebut karena alasan yang sangat politik. Beberapa petinggi oposisi terlibat dalam korupsi, sehingga Jaksa Agung yang baru dianggap bisa mengancam eksistensi mereka. Sedangkan kroni-kroni Mubarak tidak setuju dengan pencopotan tersebut karena Jaksa Agung sebagai lembaga Yudikatif, merupakan satu-satunya institusi yang tersisa yang pro dan bisa dikendalikan oleh mereka. Di mana sebelumnya militer yang dianggap masih pro terhadap kroni-kroni Mubarak telah direformasi oleh Mursi, sehingga tidak lagi pro terhadap keluarga Mubarak. Kroni-kroni Mubarak juga merasa takut dengan dekrit tersebut karena bisa saja menjadi celah untuk membawa mereka ke pengadilan dan penjara.

PENUTUP

Meski akhirnya Muhammad Mursi harus berakhir dengan kudeta yang dilakukan oleh militer, akan tetapi konsep pemerintahan dan politik berhasil ditanamkan dan direalisasikan di masyarakat selama beberapa bulan. Pemikiran inilah yang kemudian dianggap sebagai produk pemikiran Mursi dan Ikhwanul Muslimin yang baru, yang sedikit berbeda dengan konsep pemikiran Ikhwanul Muslimin Hasan Albanna.

Mursi memang merupakan kader IM yang bukan berasal dari kalangan yang dididik agama secara formal dari bawah. Beliau merupakan lulusan dari pendidikan umum yang sudah tentu berbeda pemikiran dengan Albanna yang memang sejak awal sudah bergelut dengan pendidikan agama pada usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hajaji, Anas, *Otobiografi Hasan Albanna; Tokoh Pejuang Islam*, Penerjemah Bahrin Abu Bakar dan Anwar Rasydi, (Bandung: Risalah Bandung, 1983).

Internet

<http://suarez.one.com/ead/2011/09/21/285/505135/membaca-revolusi-mesir>.

¹⁷ <http://kaisarehrema.wordpress.com/2012/10/14/jaksa-agung-dan-kotak-pandora>, diakses 10 Desember 2012.

<http://www.jurnas.com/hala-man/6/2012-07-02/214265>.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/05/27/187593/Mur-si-Shafiq-ke-Putaran-Kedua>

http://www.bbc.co.uk/indonesia/duania/2012/01/120121_mesir_pemilu.shtml.

http://de.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Mursi.